

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,

SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR : HK.02.02.41.412.12.21.2444 TAHUN 2021

REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,

SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

-2-

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK



DRA. RERI INDRIANI, APT., M.SI

LAMPIRAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.41.412.12.21.2444 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BPOM telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

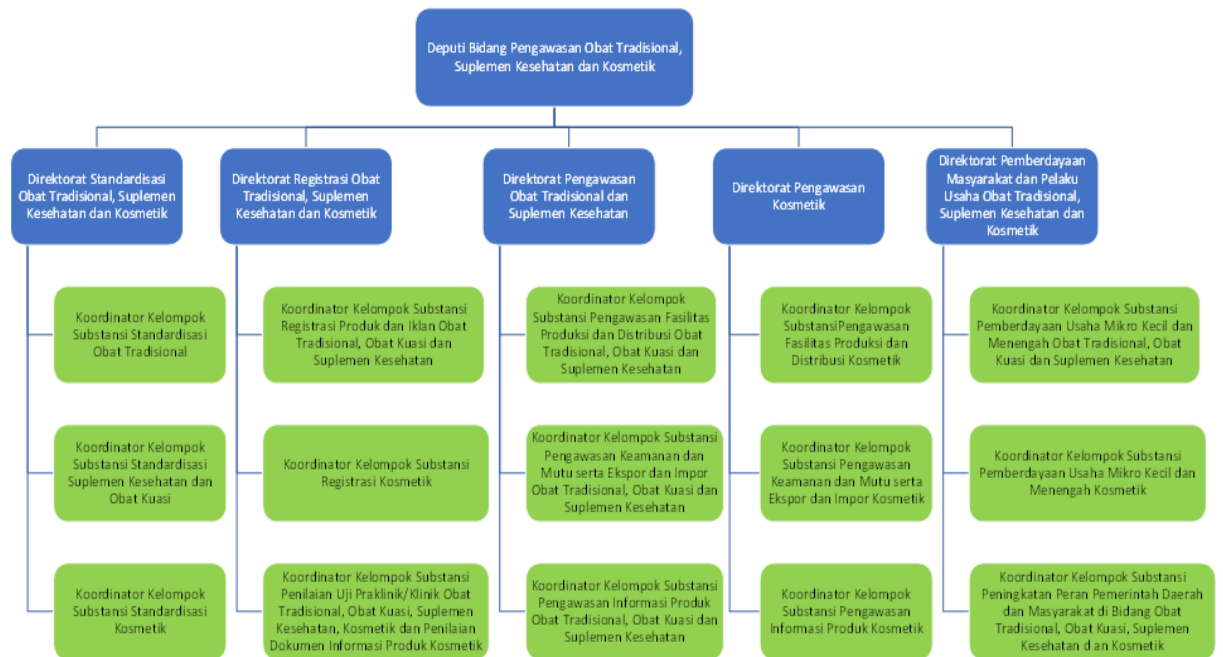
A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas, secara lebih rinci dapat dijelaskan perubahan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

- 1) Penambahan Unit Kerja Eselon II baru yaitu “Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik”.
- 2) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- 3) Direktorat Pengawasan Kosmetik terdapat pengurangan/pelimpahan fungsi pembinaan UMKM Kosmetik kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2020-2024, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat

itu dibutuhkan pegawai sebanyak 509 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik per November 2021 sejumlah 218 orang dengan proporsi 83,48% perempuan dan 16,51% laki-laki yang tersebar di lima (5) Direktorat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik didukung berbagai jabatan struktural dan fungsional sebagai dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

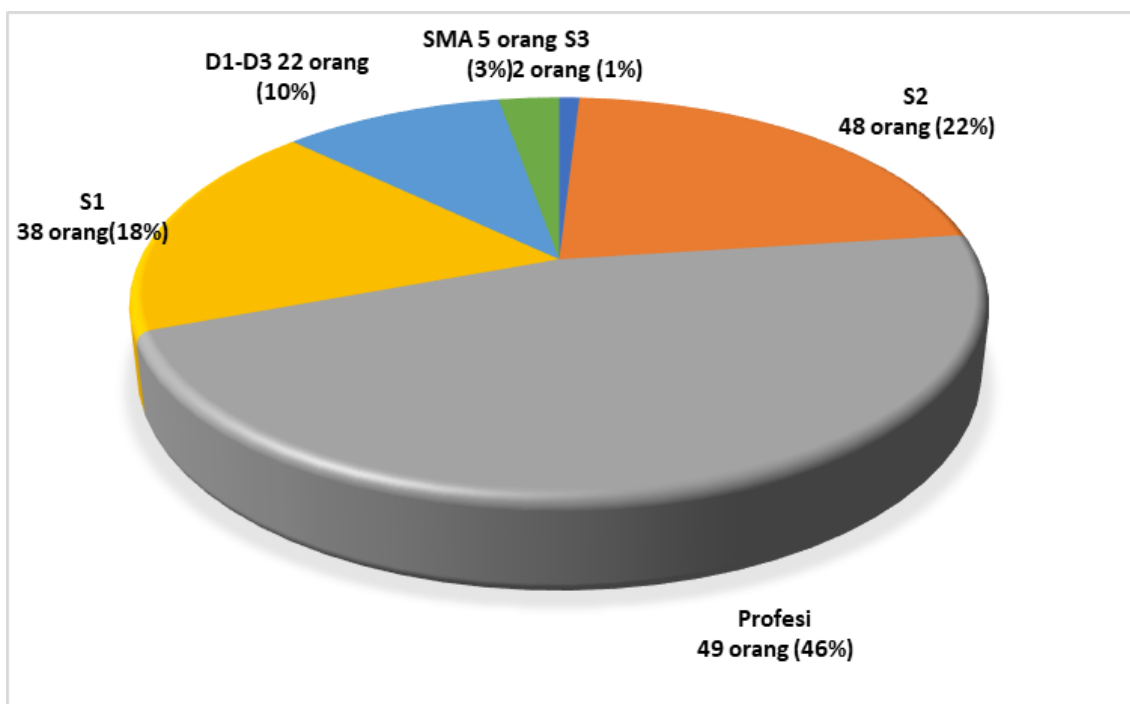
Jabatan	Jumlah Pegawai
Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1
Direktur Pengawasan Kosmetik	1
Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1
Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	34
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	64
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	53
Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	3
Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	1
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	2
Analisis Penilaian Obat dan Makanan	2
Analisis Kebijakan Madya	1
Pranata Humas Ahli Muda	1

Jabatan	Jumlah Pegawai
Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1
Analisis Anggaran Ahli Muda	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	2
Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	2
Analisis Barang Milik Negara	2
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	1
Perencana Pertama	2
Analisis Perencana	1
Arsiparis Terampil	2
Arsiparis Pertama	1
Arsiparis pelaksana Lanjutan	1
Arsiparis pelaksana	2
Pranata Komputer Ahli Pertama	2
Pranata Komputer Terampil	3
Analisis Penyusun Standard dan Peraturan	1
Fungsional Umum	8
Analisis SDM Aparatur	1
Pengelola Database	1
Pengelola keuangan	1
Pemeliharaan sarana dan Prasarana	1
Pengadministrasi Keuangan	4
Pengadministrasi Umum	10
Total Pegawai Deputi II	218

Jumlah SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memerlukan SDM sebesar 509 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 291 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.



Gambar 3. Perbandingan Jumlah Pegawai Deputy II BPOM dengan ABK 2021



Gambar 4 Tingkat Pendidikan Pegawai Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021

Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa proporsi Profesi (apoteker) masih mendominasi. Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan

memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2020 – 2024 tersaji dalam dalam table Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	SP	2020				
		No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos	83,00	83,51	100,61
		2	Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	93,00	89,88	96,65
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu OT, SK dan Kos	3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	82,00	81,38	99,24
		4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	82,00	71,02	86,61
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	83,00	87,13	104,98
		6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	86,00	70,90	82,44
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	82,83	84,46	101,97

4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	81,00	87,53	108,06
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	9	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	90,68	105,44
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan OTSKKos yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66,00	75,82	114,88
		11	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	3,38	4,25	120,00
		12	Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	82,00	92,67	113,01
		13	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	71,00	93,33	120,00
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	14	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80,00	77,11	96,39
		15	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OT dan Kos	84,00	86,67	103,18
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	85,00	82,21	96,72
		17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	81,00	77,79	96,04
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan OTSK	18	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang	75,00	85,11	113,48

	dan Kos yang berkinerja optimal		Pengawasan OTSK dan Kos			
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	1,50	0,125	8,33
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	93,45	95,64	102,34

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwas secara umum capaian kinerja Deputi II BPOM sebesar 94,55 masuk dalam kategori baik, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Sebanyak 1 (satu) sasaran program telah tercapai dengan kategori sangat baik, 8 (delapan) sasaran program tercapai dengan kategori baik, dan 1 (satu) program tercapai dengan kategori sangat kurang.

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja diatas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja Deputi II BPOM dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan /penyesuaian target kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Selain Kinerja yang disajikan dalam matriks diatas, Deputi II BPOM juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemic covid-19, antara lain ;

- Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang meliputi registrasi obat tradisional klaim penambah daya tahan tubuh, suplementasi vitamin /mineral, *handwash* dan *handgel*;
- Penyusunan dan penerbitan Pedoman Penggunaan Herbal dan Suplemen menghadapi COVID-19;
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang muncul

Dalam Renstra BPOM 2020-2024, Deputi II BPOM telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Deputi II BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

1. Peran Deputi II BPOM dibutuhkan dalam rangka pemberian persetujuan penggunaan kemasan lama untuk menunjang perekonomian yang sedang menurun. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pembelian terhadap produk mengalami penurunan (kecuali produk dengan klaim daya tahan tubuh), sehingga stok kemasan lama masih banyak. Pelaku usaha mengajukan permohonan produksi menggunakan kemasan lama dan/atau penghabisan produk OT dan SK dengan kemasan lama di peredaran untuk memangkas biaya;
2. Peran Deputi II BPOM dibutuhkan dalam mengawasi informasi dan promosi OT dan SK yang dikaitkan dengan pencegahan dan pengobatan Covid-19. Di masa pandemi ini demand produk OT dan SK di dengan klaim daya tahan tubuh semakin meningkat, namun klaim yang dicantumkan dalam iklan berlebihan dan menyesatkan;
3. Peran Deputi II BPOM dalam mengawasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang masuk ke Indonesia untuk keperluan donasi dalam rangka penanganan Covid-19;
4. Peran Deputi II BPOM dalam mengawal keamanan dan mutu produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang makin meningkat penggunaannya oleh masyarakat untuk penanganan Covid-19;
5. Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi serta modal pelaku usaha untuk

pemenuhan persyaratan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik;

6. Percepatan Perizinan Sarana Produksi di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan diperlukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan di pasaran;
7. Peran Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternative dalam pengobatan COVID-19;
8. Sulitnya akses pasar pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak berkembangnya UMKM obat tradisional yang tidak memiliki kemampuan pemasaran secara digital;
9. Beredarnya produk obat tradisional dan suplemen kesehatan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang masuk melalui jalur tidak resmi selama masa pandemic COVID-19;
10. Kelangkaan stok vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dari penularan COVID-19 dan melonjaknya harga vitamin karena banyaknya permintaan selama masa pandemic COVID-19;
11. Kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan iklim usaha yang cukup kondusif bagi startup kosmetik;
12. Pada masa pandemi covid 19, meningkatkan jumlah pengguna media online di Indonesia. Hal ini mendorong inovasi penyebaran informasi melalui strategi komunikasi berbasis digital. Menyikapi hal ini, Badan POM mengadakan kegiatan KIE dalam bentuk webinar, podcast yang memiliki jangkauan luas ke masyarakat (high impact).

Permasalahan :

1. Pelaku usaha mengeluhkan masih banyaknya sisa stok kemasan lama setelah persetujuan registrasi variasi dan daftar ulang diterbitkan;
2. Maraknya penjualan/ promosi produk di peredaran yang mengklaim sebagai pengobatan covid, klaim bombastis, dan testimoni kesembuhan;
3. Masih rendahnya literasi masyarakat terutama di bidang kesehatan (digital health literacy), terutama dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap kondisi terkini

seperti pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu menyaring dan menganalisis informasi yang benar untuk memilih dan menggunakan produk OT dan SK sesuai kebutuhan.

4. Meningkatnya pemasukan/ importasi obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk tujuan penggunaan pribadi maupun donasi memerlukan intensifikasi pengawasan baik pada saat pemasukan maupun setelah produk beredar di Indonesia;
 5. Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik memerlukan komitmen perbaikan dari pelaku usaha, namun karena terdampak pandemi pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pemenuhan aspek dan perbaikan berkesinambungan;
 6. Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan COVID-19 sehingga perlu peran BPOM dalam pengawasan baik *pre /postmarket* produk tersebut;
 7. Keterbatasan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi secara optimal selama masa pandemic COVID-10 untuk mencegah penularan COVID-19 masukan masa pandemic;
 8. Tidak ada data stok ketersediaan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemic COVID-19 pada setiap daerah/provinsi di seluruh Indonesia;
 9. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Deputi II BPOM masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan timeline registrasi produk peningkatan daya tahan tubuh;
 10. Koordinasi dengan peneliti */stakeholder* terkait dalam pengembangan produk yang belum optimal;
 11. Tidak tersedia peraturan yang khusus mengatur penyimpanan dan penyaluran obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk menjamin mutu dan keamanan produk selama di peredaran;
 12. BPOM mendapatkan tantangan untuk mampu memberikan informasi perizinan kosmetik sedemikian rupa sehingga mudah diakses, mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan
- b. Promosi/Iklan OT dan SK di Media Online
- Potensi:

Peran BPOM dibutuhkan dalam rangka mengawal peredaran promosi/iklan OT dan SK di media online (marketplace, website, media sosial, telemedisin, dll). Kemudahan dalam bertransaksi menyebabkan maraknya penjualan OT dan SK melalui media online baik oleh pelaku usaha maupun perseorangan.

Permasalahan:

1. Maraknya akun perseorangan/non official yang membuat promosi produk OT dan SK di media online (marketplace, website dan media sosial) tanpa sepengetahuan pemilik NIE;
2. Banyaknya iklan produk Tanpa Izin Edar dan produk palsu di media online;
3. Munculnya beragam aplikasi media baru (seperti aplikasi telemedisine, aplikasi berita online, dan platform2 e-commerce baru yang belum pernah diawasi sebelumnya);
4. Kesulitan dalam penanganan pelanggaran promosi OT dan SK di platform global atau situs internasional seperti Facebook, Google, Instagram karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

c. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

Deputi II BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem kesehatan Nasional. Dalam SKN, BPOM mendukung area reformasi yaitu:

1. Area 4 “Pengendalian penyakit dan Imunisasi”
Kontribusi Deputi II BPOM pada area ini melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu produk dan perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
2. Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”
Sehubungan dengan akan dimasukkannya produk Fitofarmaka (FF) ke dalam daftar obat Formularium Nasional untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka BPOM perlu melakukan sampling dan pengujian khusus untuk memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk Fitofarmaka.

- relaksasi dan percepatan perizinan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta deregulasi standar untuk percepatan perijinan serta kemudahan akses dan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan;
- Memberikan dorongan Industri Obat Tradisional yang memproduksi Fitofarmaka untuk mengimplementasikan CPOTB terkini untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan sehingga produk Fitofarmaka dapat masuk dalam JKN melalui pendampingan penelitian praklinik/ klinik;
- Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan pengembangan obat herbal/OMAI sebagai obat rujukan dalam program JKN
- Perlu adanya Laboratorium terpadu utk uji lab OT dan Kosmetik di Indonesia.

3. Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”

- Sesuai amanat di dalam UU Cipta Kerja dan amanat PP 5 Tahun 2021 kemudahan berusaha diakomodir di dalam suatu sistem perijinan terpadu yang dikelola oleh BKPM yaitu sistem aplikasi perijinan berbasis risiko. Termasuk didalamnya perijinan terkait sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin edar produk;
- Badan POM mempunyai salah satu misi yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha dengan keberpihakan terhadap UMKM OT untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global. Adapun tujuan utamanya adalah melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Berkenaan hal itu perlu dilakukan kegiatan pendampingan UMKM OT untuk dapat langsung dibimbing dalam implementasi dan mendapatkan solusi dari permasalahan perizinan, pelaksanaan aspek CPOTB dan Ijin Edar;

- Badan POM memiliki program Badan POM goes to school/campus yang membentuk Duta Kosmetik/Jamu Aman. Program ini menghasilkan 33 Duta Kosmetik Aman dan 25 Duta Jamu Aman yang pada tahun 2021 telah melakukan KIE kepada komunitasnya dengan jumlah 11.069 peserta. Selanjutnya kegiatan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan indeks kesadaran masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- Badan POM melakukan program sinergisitas/advokasi dengan lintas sektor dalam rangka kelancaran perizinan UMKM OT dan kosmetik

Permasalahan :

1. Dalam upaya pengawalan keamanan dan mutu produk Fitofarmaka, selain pengujian keamanan dan mutu secara umum juga diperlukan pengujian mutu kadar fraksi aktif atau senyawa aktif yang mendukung klaim sehingga memerlukan penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM, meliputi instrumentasi, Metode Analisa senyawa aktif dan kompetensi SDM penguji;
2. Pengawasan/pengawalan implementasi CPOTB terkini pada industri obat tradisional yang memproduksi fitofarmaka untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan;
3. Kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah;
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait tata cara registrasi obat tradisional, tata cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui proses One Single Submission (OSS) dan penerapan aspek CPOTB bertahap, terutama selama masa pandemi ini. Badan POM telah memberikan beberapa relaksasi dalam proses registrasi obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
5. Permasalahan inkonsistensi kualitas (higienes) jamu gendong di Indonesia, sehingga perlu sosialisasi yg berkesinambungan;

6. Keterbasan modal usaha UMKM OT dan Kos, bagi para startup sehingga perlu dukungan modal atau bantuan sarana dari pemerintah atau ditingkatkan dukungan orang tua angkat;
7. Sulitnya mendapatkan Penanggung jawab teknis sarana produksi baik OT maupun Kos;
8. Masih maraknya produk expired, tidak mempunyai Izin Edar atau produk ilegal lainnya, sehingga perlu digalakkan sosialisasi terkait cek KLIK ke lapisan masyarakat seperti anak sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya;
9. Pengaturan aspek-aspek komitmen (izin lokasi, IMB, dan izin lingkungan) dalam perizinan berusaha yang menjadi kewenangan otonomi Pemerintah Daerah tidak seluruhnya sama di Indonesia;
10. Tingkat Pemahaman dan kemampuan tiap duta jamu/ kosmetik aman didalam memiliki dan memanfaatkan teknologi informasi tidak sama sehingga terdapat perbedaan materi dalam penyajian KIE yang informatif dan menarik minat masyarakat;
11. Pemahaman peserta webinar/ podcast terkait materi yang disampaikan bisa berbeda, karena tidak ada interaksi langsung pada kanal media online;
12. Webinar dan podcast yang ditayangkan melalui kanal media online memerlukan dukungan perangkat dan koneksi jaringan yang menuntut biaya lebih dari peserta.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. Tidak ada perubahan Visi dan Misi dan Tujuan BPOM, mengingat Deputy II BPOM merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Deputy II adalah sama dengan Visi BPOM. Adapun Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut

Visi Deputy II 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi Deputy II 2020-2024	1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

	<p>dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Tujuan Deputi II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. 2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi

	<p>dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima
--	---

1. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2020- 2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan OT, SK dan Kos 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sector		
			2. Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos		

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
			3. Tingkat Efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
	<p>2. Meningkatkan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.</p>	<p>1. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal</p>	<p>1. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos dan pemangku kepentingan.</p>	<p>Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).</p>

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM dan Lembaga Riset, dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu OT, SK dan Kos dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing OT, SK dan Kos, serta peningkatan pengembangan UMKM bersama Stakeholder terkait	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah	4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket OT, SK dan Kos	Penguatan pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif
			2. Persentase Obat Tradisional,		

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga			Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat		berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
		3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu		

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
			berdasarkan hasil pengawasan		
	5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	1. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket OT, SK dan Kos	Penguatan pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
		2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen	1. Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
		Kesehatan dan Kosmetik	2. Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu		
		3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	1. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		
		3. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		
		2. Terkelolanya Keuangan Deputy	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		
			1. Nilai Kinerja Anggaran Deputy		

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Kebijakan	Strategi
		Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		

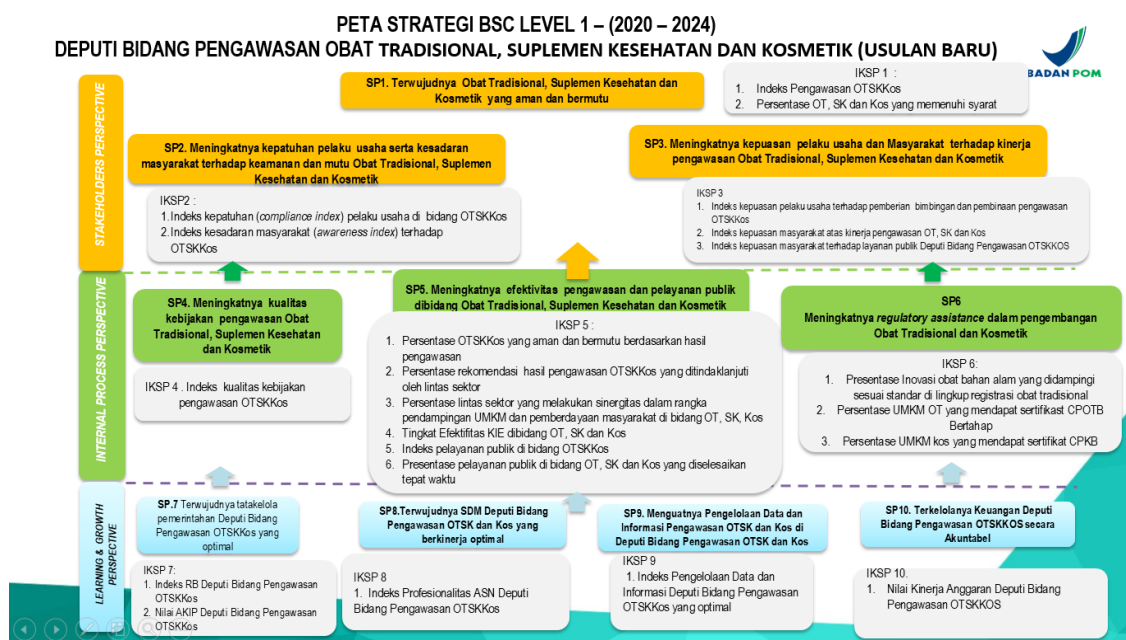
2. Sasaran Strategi dan IKU Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat perubahan peta strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Perubahan tersebut didasarkan karena adanya penambahan OTK baru di lingkungan kedeputian II yaitu Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sehingga mengakibatkan adanya penambahan Indikator Kinerja di Kedeputian II. Penambahan Indikator baru tersebut adalah:

- 1) Persentase Lintas Sektor yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang OT, SK dan Kos, indikator tersebut masuk kedalam Sasaran Program 5 (SP.5) yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 2) Persentase UMKM OT yang mendapat Sertifikat CPOTB Bertahap
- 3) Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB

Untuk Penambahan Indikator 2 dan 3, keduanya masuk kedalam Sasaran Program 6 (SP.6) Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Adapun Sasaran Program dan IKU Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:



Gambar 5: Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024

Peta strategis level 1 diturunkan menjadi peta strategis level 2 yang merupakan acuan bagi unit di Deputy II BPOM untuk mendukung tercapainya sasaran program Deputy II. Berikut peta strategis level 2 dari unit-unit di Deputy II BPOM. Berikut peta strategis level 2 dari unit-unit di Deputy II BPOM sebagai berikut:

1) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

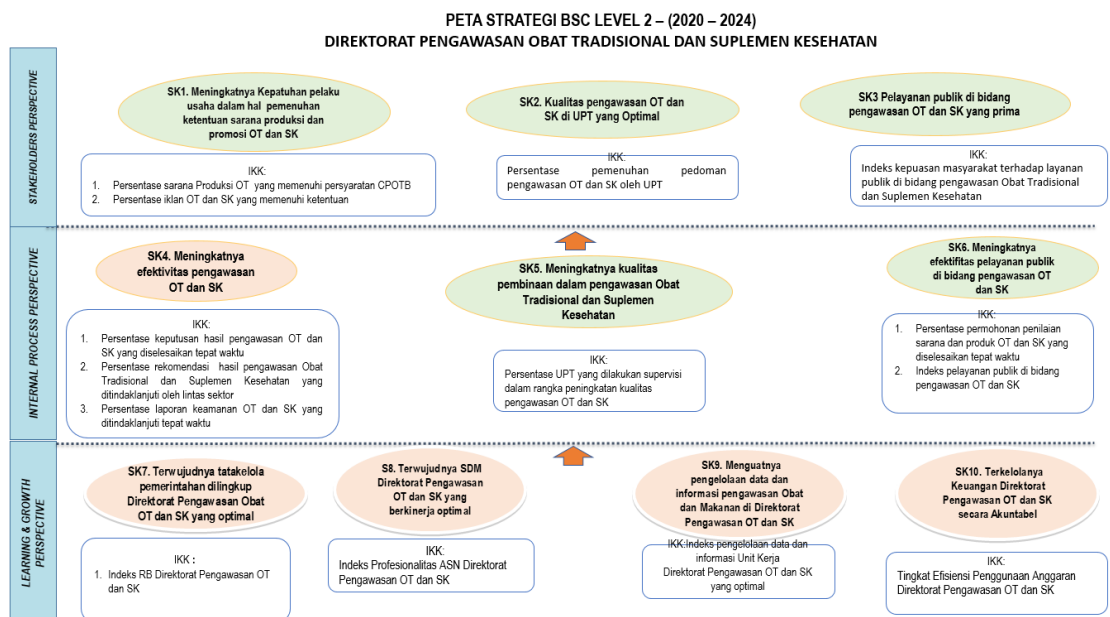
Terdapat perubahan peta strategis Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Perubahan tersebut didasarkan atas evaluasi capaian tahun sebelumnya, Berikut perubahan pada Peta Strategi:

1. Persentase Iklan yang memenuhi ketentuan dilakukan perubahan DO dikarenakan Promosi/iklan tidak hanya dibuat oleh pelaku usaha dan distributor, namun juga banyak promosi yang dilakukan oleh perseorangan/individu (non-official) atau dibuat reseller yang di luar kontrol dari pelaku usaha/distributor. Kami mengusulkan untuk tidak memasukkan iklan yang dibuat oleh perseorangan/individu dan reseller ke dalam perhitungan indikator tersebut dengan justifikasi :

- Ketidaksesuaian dengan Sasaran Indikator yaitu Kepatuhan pelaku usaha yang tinggi dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi, distribusi, informasi dan promosi OT dan SK. Perseorangan/individu bukan termasuk golongan pelaku usaha/distributor, sehingga jika iklan yang dibuat oleh perseorangan/individu dimasukkan ke dalam perhitungan indikator maka menjadi tidak kompatibel atau relevan dengan sasaran tersebut.
- Peningkatan tren pelanggaran iklan OT dan SK di media internet (69,7%) banyak didominasi oleh akun perseorangan/individu (nonofficial). Hal ini terjadi karena akun perseorangan/individu tidak mengetahui ketentuan periklanan. Akun perseorangan/individu dapat dengan mudah membuat akun di marketplace dan media sosial, yang nantinya akan digunakan sebagai sarana promosi/iklan OT dan SK yang dijualnya.
- Akun perseorangan/individu (nonofficial) dan reseller tidak dapat dikontrol oleh pelaku usaha/distributor karena produk OT dan SK bisa dijual bebas sehingga siapapun dapat menjualnya

dengan mudah di akun marketplace atau berpromosi di media sosial.

2. Penghapusan Indikator Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK hal ini dikarenakan adanya penambahan Unit Kerja baru yaitu Dit. PMPU OT SK dan Kos yang memiliki fungsi pembinaan, maka Tingkat Efektifitas KIE hanya diukur di Unit tersebut.
3. Penghapusan Indikator Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB bertahap dikarenakan pencapaian indikator tersebut diampu oleh 2 (dua) unit sehingga Indikator Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB bertahap terdapat pada level 1 (satu).
4. Penghapusan Indikator Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB dikarenakan adanya penambahan Unit Kerja baru yaitu Dit. PMPU OT,SK dan Kos yang melakukan pembinaan kepada UMKM.
5. Adanya penurunan target Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%).



Gambar 6: Peta Strategis Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2020-2024

2) Direktorat Pengawasan Kosmetik

Terdapat perubahan peta strategis Direktorat Pengawasan Kosmetik. Perubahan tersebut didasarkan atas evaluasi capaian tahun sebelumnya, Berikut perubahan pada Peta Strategi:

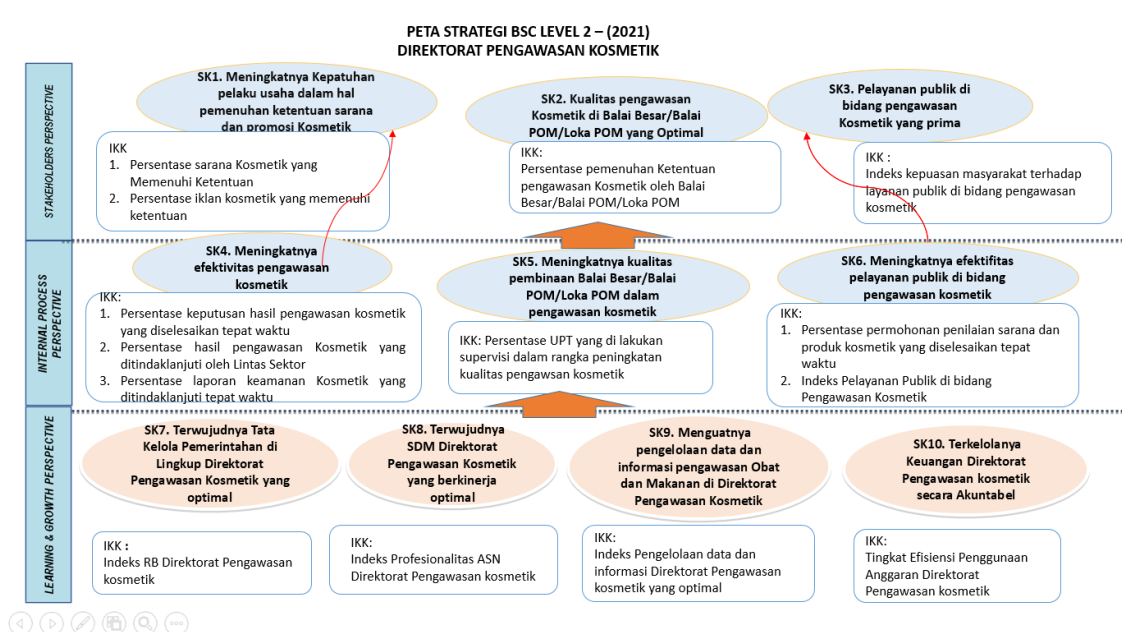
1. Persentase Iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan dilakukan perubahan DO dikarenakan Promosi/iklan tidak hanya dibuat oleh pelaku usaha dan distributornya, namun juga banyak promosi yang dilakukan oleh perseorangan/individu (non-official) atau dibuat reseller yang di luar kontrol dari pelaku usaha/distributor. Kami mengusulkan untuk tidak memasukkan iklan yang dibuat oleh perseorangan/individu dan reseller ke dalam perhitungan indikator tersebut dengan justifikasi :

- Ketidaksesuaian dengan Sasaran Indikator yaitu Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana promosi/distribusi dan promosi Kosmetik. Dimana perseorangan/individu bukan termasuk golongan pelaku usaha/distributor, sehingga jika iklan yang dibuat oleh perseorangan/individu dimasukkan ke dalam perhitungan indikator maka menjadi tidak kompatibel atau relevan dengan sasaran tersebut.
- Peningkatan tren pelanggaran iklan Kosmetik di media internet (60,91%) banyak didominasi oleh akun perseorangan/individu (nonofficial). Hal ini terjadi karena akun perseorangan/individu tidak mengetahui ketentuan periklanan. Akun perseorangan/ individu dapat dengan mudah membuat akun di marketplace dan media sosial, yang nantinya akan digunakan sebagai sarana promosi/iklan Kosmetik yang dijualnya.
- Akun perseorangan/individu (nonofficial) dan reseller tidak dapat dikontrol oleh pelaku usaha/distributor karena produk Kosmetik bisa dijual bebas sehingga siapapun dapat menjualnya dengan mudah di akun marketplace atau berpromosi di media sosial.

2. Penghapusan Indikator Tingkat Efektifitas KIE di bidang Kosmeik hal ini dikarenakan adanya perubahan OTK dengan penambahan Unit Kerja baru yaitu Dit. PMPU, maka Tingkat

Efektifitas KIE hanya diukur di Unit tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Penghapusan Indikator Persentase UMKM Kos yang menerima sertifikat CPKB dikarenakan pencapaian indikator tersebut diampu oleh 2 (dua) unit sehingga Indikator Persentase UMKM Kos yang menerima sertifikat CPKB terdapat pada level 1 (satu)
4. Penghapusan Indikator Jumlah UMKM Kosmetik yang difasilitasi dalam pemenuhan CPKB dikarenakan adanya perubahan OTK dengan penambahan Unit Kerja baru yaitu Dit. PMPU OT,SK dan Kos yang melakukan pembinaan kepada UMKM
5. Adanya penurunan target Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%).

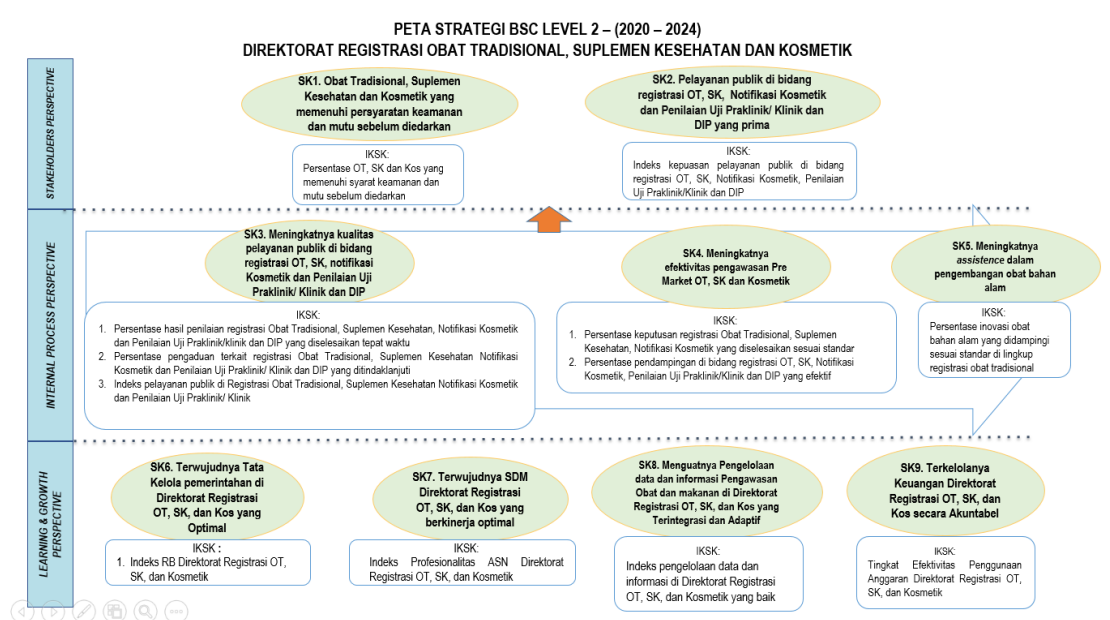


Gambar 7: Peta Strategis Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2020-2024

- 3) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tidak terdapat perubahan dalam Peta Strategis Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tahun 2020 – 2024, hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Masih terdapat relevansi antara bisnis proses Direktorat Registrasi OT, SK, Kos dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan.
2. Dalam penyusunan dan penetapan sasaran, indikator, dan target disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis saat ini hingga lima tahun kedepan, sehingga pengukuran dan penetapan target telah mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin dapat mempengaruhi pencapaian target serta keselarasan dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya yang dimiliki oleh direktorat



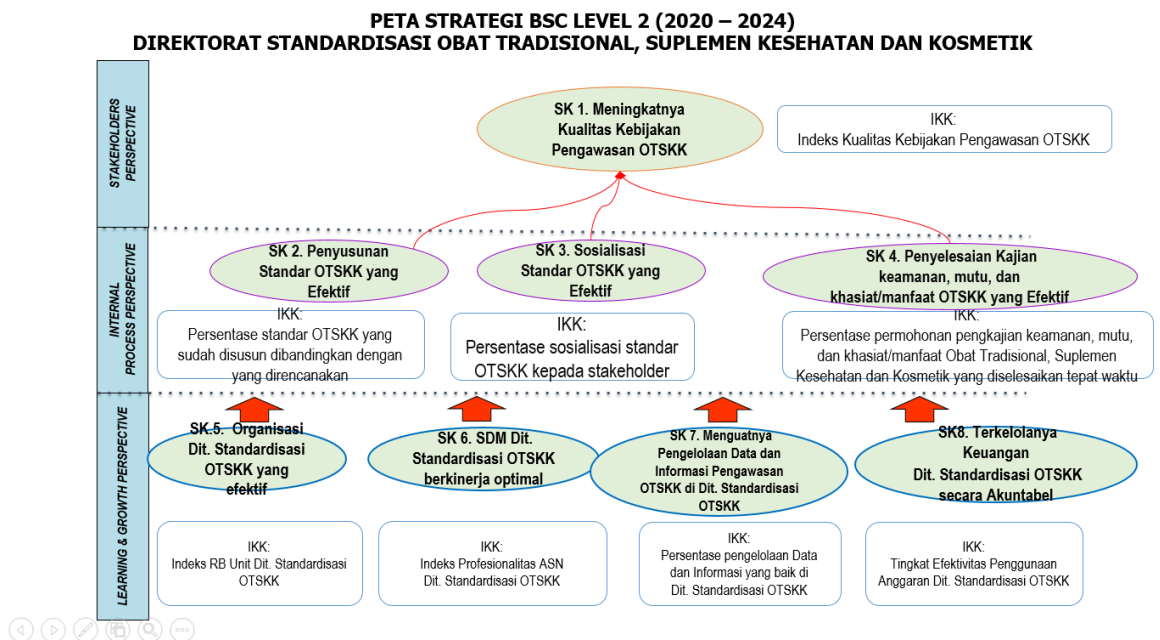
Gambar 8: Peta Strategis Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024

4) Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat perubahan sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan serta target dalam Peta Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tahun 2020 – 2024, hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Penghapusan sasaran kegiatan Tersedianya Identifikasi Kebutuhan Standar OTSKK dan indikatornya Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar OTSKK sesuai Roadmap, karena sasaran kegiatan tersebut merupakan bagian dari sasaran kegiatan Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif; sehingga untuk

efektifitas pengukuran, cukup dihitung dalam 1 sasaran kegiatan saja.



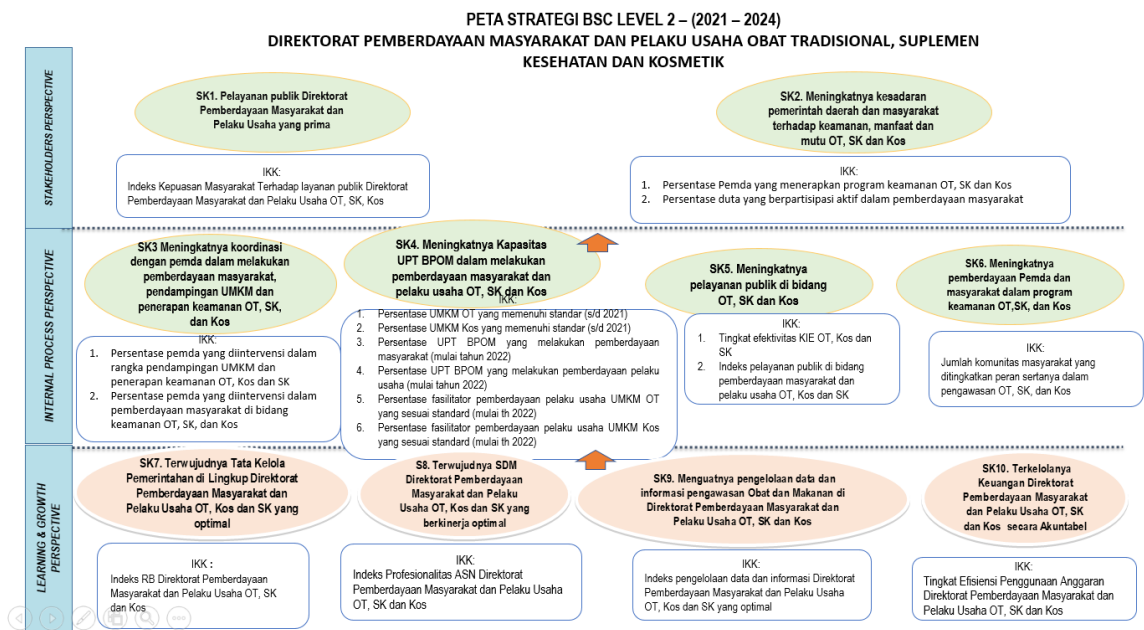
Gambar 9: Peta Strategis Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024

5) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan unit baru yang dibentuk tahun 2021 berdasar Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sehingga belum ada peta strategi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di Renstra TA 2020-2024. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 ada perubahan peta strategi dimana di tahun 2021 ada indikator Persentase UMKM OT yang memenuhi standar dan Persentase UMKM Kos yang memenuhi standar. Di tahun 2022 tidak ada indikator tersebut karena indikator tersebut telah diserahkan UPT untuk menjadi kinerja UPT, dan pusat melakukan monev terhadap hal tersebut. Di tahun 2022, indikator tersebut digantikan menjadi:

1. Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat
2. Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha
3. Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standar

4. Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kos yang sesuai standar



Gambar 10: Peta Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024

B. **Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

1. **Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Dalam hal arah kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu kepada Arah Kebijakan BPOM. Berdasarkan Arah Kebijakan BPOM dan dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
- b. Perubahan tata urut Arah Kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Arah Kebijakan BPOM dan arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BPOM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4: Perubahan Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No.	Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1.	Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan OT, SK dan Kos	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket OT, SK dan Kos
2.	Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos dan pemangku kepentingan.	Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos dan pemangku kepentingan.
3.	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM, dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu OT, SK dan Kos dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing OT, SK dan Kos, serta peningkatan pengembangan UMKM bersama <i>Stakeholder</i> terkait	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM dan Lembaga Riset , dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu OT, SK dan Kos dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing OT, SK dan Kos, serta peningkatan pengembangan UMKM bersama <i>Stakeholder</i> terkait
4.	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket OT, SK dan Kos	Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan OT, SK dan Kos
5.	Peningkatan kualitas kebijakan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Peningkatan kualitas kebijakan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
6.	Penguatan koordinasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah	Penguatan koordinasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah

No.	Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
7.	Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pegawai

2. Strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tidak terdapat Perubahan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik namun hanya ada perubahan tata urutan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Secara rinci perubahan strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5: Perubahan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No.	Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.	Penguatan pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2.	Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).	Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
3.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

No.	Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
4.	Penguatan pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
5.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

C. **Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

1. **Target Kinerja**

Kinerja Deputi II BPOM yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 1 Deputi II BPOM, terdapat penambahan** 3 indikator sasaran program

yang salah satunya merupakan pecahan dari indikator sasaran program sebelumnya sehingga total terdapat 22 (dua puluh dua) IKU.

Perubahan indikator yaitu pada IKSP Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik dipecah menjadi 2 (dua) IKSP yaitu:

- a. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB; dan
- b. Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap Serta penambahan Indikator Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos.

Selain itu juga terdapat beberapa **penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan *baseline* baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 22 (dua puluh dua) IKU Deputy II BPOM, secara umum target tetap dan meningkat.

Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang berkualitas**, terdapat penurunan target menyesuaikan dengan target dari BPOM.
- b. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**, penurunan target disebabkan adanya penambahan unit baru sebagai unit layanan publik, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- c. **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**, penurunan target dilakukan atas penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun dengan mempertimbangkan terhadap evaluasi pelaksanaan tahun 2020
- d. **Indeks RB dan Nilai AKIP**, Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan

(20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap *trend* kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP

- e. **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**, di mana penurunan target disebabkan adanya perubahan komposisi penilaian NKA.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Target Indikator Kinerja Deputy II BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	86	89	93	95	83,51	84	86	88	89
	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat	93	94	95	96	97	89,88	94	95	96	97
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	82	83	84	85	86	81,38	85	86	87	88
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	82	85	88	91	93	71,02	74	78	81	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik	83	84	85	86	87	87,13	88,2	89,3	90,4	91,6
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	86	88	89,5	90,5	92	70,90	73	75	77	79

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
	tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik										
	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	83	84	85	86	92,67	89	90	90	91
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional	80	82	85	88	90	77,11	82	85	88	90
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik	84	86	89	91	93	86,67				
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap							86,7	90,0	93,3	96,7
	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB							86	87	88	89
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85	89	93	94	95	82,21	82,9	85,0	87,1	89,2
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	85	90	91	92	77,79	79,3	80,8	82,3	83,8
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	75	77	80	82	85	85,11	84,20	84,85	85,5	86,15

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Kesehatan dan Kosmetik										
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,5	2,00	2,26	2,50	3,00	0,125	2,00	2,25	2,50	3,00
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,45	94,15	94,85	95,55	96,25	95,64	92,3	92,9	94,1	95,3

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melaksanakan Program Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan OTK Lama	Kegiatan OTK Baru
1.		Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BPOM secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Deputi II BPOM 2020-2024.

D. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Deputi II BPOM serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Deputi II BPOM dimana terdapat pembentukan unit kerja baru,

pergeseran tugas dan fungsi dari unit kerja lama ke unit kerja baru. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM pada Tabel Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Bpom Pada Lampiran I Matriks Kinerja Dan Pendanaan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

TABEL 6. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BPOM

PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2020-2024

Semula						Menjadi						Pro PN	Keterangan	
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021	2022			2023
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik														
SP 1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu						SP 1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu						
1,1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,00	86,00	89,00	93,00	95,00	1,1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,51	84,00	86,00	88,00	89,00	Pro PN Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.
1,2	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	1,2	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat	89,88	94,00	95,00	96,00	97,00	Pro PN
SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						
2,1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	2,1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	81,38	85,00	86,00	87,00	88,00	
2,2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	82,00	85,00	88,00	91,00	93,00	2,2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	71,02	74,00	78,00	81,00	84,00	

Semula						Menjadi					Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021			2022	2023
SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						
3,1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	3,1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik	87,13	88,20	89,30	90,40	91,60	
3,2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,00	88,00	89,50	90,50	92,00	3,2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	70,90	73,00	75,00	77,00	79,00	Dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun
3,3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,83	85,33	87,33	89,17	92,00	3,3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,46	83,50	84,38	85,25	86,13	Dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun
SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						
4,1	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	81,00	83,00	85,00	87,00	90,00	4,1	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	87,53	88,00	89,00	89,50	90,00	
SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik						
5,1	Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	87,00	89,00	90,00	91,00	5,1	Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,68	91,00	91,50	92,00	92,50	

Semula						Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023				2024	2021			2022	2023	2024
5,2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66,00	68,50	71,00	73,50	78,50	5,2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75,82	76,00	78,00	80,00	82,00		
							5,3	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK, Kos		80,00	82,00	84,00	86,00		
5,3	Tingkat Efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	71,00	74,00	77,00	81,00	84,00	5,4	Tingkat Efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	93,33	92,34	94,19	96,08	97,00		
5,4	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,38	3,66	3,94	4,23	4,51	5,5	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,25	3,28	4,36	4,46	4,55		
5,5	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	5,6	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	92,67	89,00	90,00	90,00	91,00		
SP 6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat tradisional dan kosmetik						SP 6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat tradisional dan kosmetik							
6,1	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional	80,00	82,00	85,00	88,00	90,00	6,1	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional	77,11	82,00	85,00	88,00	90,00		
6,2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional dan kosmetik	84,00	86,00	89,00	91,00	93,00									Indikator di split untuk UMKM OT dan SK

Semula						Menjadi						Pro PN	Keterangan	
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021	2022			2023
						6,2	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap		86,70	90,00	93,30	96,70	Pro PN	
						6,3	Persentase UMKM Kos yang mendapat sertifikat CPKB		86,00	87,00	88,00	89,00		
SP 7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal					SP 7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal							
7,1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,00	89,00	93,00	94,00	95,00	7,1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,21	82,90	85,00	87,10	89,20	Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB
7,2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	85,00	90,00	91,00	92,00	7,2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77,79	79,30	80,80	82,30	83,80	Dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun
SP 8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal						SP 8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal						
8,1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00	8,1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,11	84,20	84,85	85,50	86,15	
SP 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik						SP 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik						

Semula						Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023				2024	2021			2022	2023	2024
9,1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,50	2,00	2,26	2,50	3,00	9,1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0,125	2,00	2,25	2,50	3,00		
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel						SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel							
10,1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,45	94,15	94,85	95,55	96,25	10,1	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95,64	92,30	92,90	94,10	95,30		Dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun
1. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan															
SK 1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK						SK 1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK							
1,1	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	77,00	80,00	83,00	86,00	89,00	1,1	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	77,36	80,00	83,00	86,00	89,00		
1,2	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	42,26	53,53	64,81	76,09	87,37	1,2	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	83,33						Pemindahan indikator ke level Deputi
1,3	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	1,3	Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	59,12	75,00	76,00	77,00	78,00		

Semula						Menjadi						Pro PN	Keterangan	
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021	2022			2023
SK 2	Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal						SK 2	Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal						
2,1	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	2,1	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	98,63	82,00	84,00	86,00	88,00	
SK 3	Pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK yang prima						SK 3	Pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK yang prima						
3,1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	3,1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						
4,1	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	73,00	76,00	79,00	83,00	85,00	4,1	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	74,80	76,00	79,00	83,00	85,00	
4,2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	4,2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,13	74,00	76,00	78,00	80,00	
4,3	Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	4,3	Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	93,00	94,00	95,00	96,00	

Semula						Menjadi					Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021			2022	2023
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM OT dalam pemenuhan CPOTB						SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM OT dalam pemenuhan CPOTB						
5,1	Jumlah UMKM Obat Tradisional difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	5,1	Jumlah UMKM Obat Tradisional difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	100					Penghapusan indikator akibat penambahan fungsi pembinaan UMKM ke PMPU OT,SK Kos
SK 6	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						SK 6	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						
6,1	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	6,1	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	64,29	61,00	62,00	63,00	64,00	
SK 7	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						SK 7	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						
7,1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	7,1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	96,16	89,00	90,00	91,00	92,00	
7,2	Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	7,2	Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,24	4,35	4,45	4,51	4,55	
7,3	Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	88,81	90,59	92,40	94,25	96,13	7,3	Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	91					Penghapusan indikator akibat penambahan fungsi pembinaan UMKM ke PMPU OT,SK Kos

Semula						Menjadi					Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021			2022	2023
SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal						SK 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal						
8,1	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88,00	90,00	93,00	94,00	95,00	8,1	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83,83	83,00	85,50	88,00	90,50	Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB
SK 9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal						SK 9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal						
9,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00	9,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	86,49	82,50	82,75	83,00	83,25	
SK 10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK						SK 10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK						
10,1	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	10,1	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	0	2,00	2,26	2,50	3,00	
SK 11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel						SK 11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara Akuntabel						
11,1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	11,1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	99,00	99,00	99,00	99,00	

2. Direktorat Pengawasan Kosmetik

Semula							Menjadi						Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023			2024	
SK 1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik						SK 1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik								
1,1	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi ketentuan	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	1,1	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi ketentuan	85.05	86,00	87,00	88,00	89,00			
1,2	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	1,2	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	86.67						Pemindahan indikator ke level Deputi	
1,3	Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	1,3	Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	80.11	86,00	87,00	88,00	89,00			
SK 2	Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal						SK 2	Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal								
2,1	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	2,1	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	92.65	84,00	85,00	86,00	87,00			
SK 3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima						SK 3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima								
3,1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	3,1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	83.63	84,00	84,50	85,00	85,50			

Semula						Menjadi						Pro PN	Keterangan	
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021	2022			2023
SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik						SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik						
4,1	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	4,1	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	77.29	86,00	87,00	88,00	89,00	
4,2	Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	4,2	Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	79.51	82,00	83,00	84,00	85,00	
4,3	Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	4,3	Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	88.86	89,00	90,00	91,00	92,00	
SK 5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik						SK 5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik						
5,1	Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	5,1	Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	85.71	81,00	82,00	83,00	84,00	
SK 6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik						SK 6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik						
6,1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	6,1	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	97.53	91,00	92,00	93,00	94,00	

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Semula					Menjadi					Pro PN	Keterangan		
		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023			2024	
6,2	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	3,51	4,40	4,51	4,55	4,60	6,2	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.26	4,40	4,51	4,55	4,60		
6,3	Tingkat Efektifitas KIE dibidang Kosmetik	88,81	90,59	92,40	94,25	96,13	6,3	Tingkat Efektifitas KIE dibidang Kosmetik	93.19						Penghapusan indikator akibat penambahan fungsi pembinaan UMKM ke PMPU OT,SK Kos
SK 7	Meningkatnya pendampingan UMKM Kosmetik dalam pemenuhan CPKB						SK 7	Meningkatnya pendampingan UMKM Kosmetik dalam pemenuhan CPKB							
7,1	Jumlah UMKM kosmetik yang difasilitasi dalam pemenuhan CPKB	56,00	70,00	80,00	90,00	100,00	7,1	Jumlah UMKM kosmetik yang difasilitasi dalam pemenuhan CPKB	66						Penghapusan indikator akibat penambahan fungsi pembinaan UMKM ke PMPU OT,SK Kos
8SK 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal						8SK 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal							
8,1	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	85,00	89,00	93,00	94,00	95,00	8,1	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	78.66	80,00	81,00	82,00	83,00		Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB
SK 9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal						SK 9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal							
9,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00	9,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	80.53	81,00	82,00	83,00	84,00		

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022			2023	2024	
SK 10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik						SK 10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik								
10,1	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	10,1	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	0	2,00	2,25	2,50	3,00			
SK 11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel						SK 11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel								
11,1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11,1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik																
SK 1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan						SK 1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan								
1,1	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85,00	93,00	93,50	94,00	94,50	1,1	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93,29	93,00	93,50	94,00	94,50	Pro PN		
SK 2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktinik/ Klinik dan DIP yang prima						SK 2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktinik/ Klinik dan DIP yang prima								

Semula						Menjadi						Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023				2024	2021	2022			2023	2024
2,1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratiklinik/Klinik dan DIP	79,00	83,00	84,00	85,00	86,00	2,1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratiklinik/Klinik dan DIP	81,49	83,00	84,00	85,00	86,00		
SP 3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/ Klinik dan DIP						SP 3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/ Klinik dan DIP							
3,1	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70,00	82,00	82,50	83,00	83,50	3,1	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	84,61	82,00	82,50	83,00	83,50		
3,2	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	3,2	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	86,27	73,00	74,00	75,00	76,00		
3,3	Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/ Klinik	3,51	4,35	4,45	4,51	4,55	3,3	Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratiklinik/ Klinik	4,24	4,35	4,45	4,51	4,55		
SP 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Pre Market OT, SK dan Kosmetik						SP 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Pre Market OT, SK dan Kosmetik							
4,1	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68,00	82,00	82,50	83,00	83,50	4,1	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	82,41	82,00	82,50	83,00	83,50	Pro PN	

Semula						Menjadi						Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023				2024	2021	2022			2023	2024
4,2	Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praliniik/Klinik dan DIP yang efektif	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	4,2	Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praliniik/Klinik dan DIP yang efektif	86,64	76,00	77,00	78,00	79,00		
SK 5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan						SK 5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan							
5,1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80,00	82,00	85,00	88,00	90,00	5,1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	77,11	82,00	85,00	88,00	90,00		
SK 6	Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Efektif						SK 6	Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Efektif							
6,1	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	81,00	92,00	93,00	94,00	95,00	6,1	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	81,42	84,70	87,20	89,70	92,20		Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB
SK 7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal						SK 7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal							
7,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	75,00	77,00	80,00	82,00	85,00	7,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	83,59	86,00	86,50	87,00	87,50		
SK 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos						SK 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos							

Semula							Menjadi						Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023			2024	
8,1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	8,1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	0,5	2,00	2,25	2,50	3,00			
SK 9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel						SK 9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel								
9,1	Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	96,00	96,00	97,00	97,00	98,00	9,1	Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	100	96,00	97,00	97,00	98,00			
4. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik																
SK 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik						SK 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								
1,1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	88,00	88,50	89,00	90,00	1,1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.53	88,00	89,00	89,50	90,00			
SK 2	Tersedianya Identifikasi Kebutuhan Standar OTSKK						SK 2	Tersedianya Identifikasi Kebutuhan Standar OTSKK								
2,1	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar OTSKK sesuai Roadmap	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	2,1	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar OTSKK sesuai Roadmap	171	90,00					Penghapusan IKS 2 pada tahun 2022 dikarenakan sasaran kegiatan tersebut merupakan bagian dari sasaran kegiatan Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif, sehingga untuk	

Semula						Menjadi					Pro PN	Keterangan		
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target					
		2020	2021	2022	2023				2024	2021			2022	2023
													efektifitas pengukuran, cukup dihitung dalam 1 sasaran kegiatan saja	
SK 3	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif						SK 3	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif						
3,1	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	80,00	90,00	91,00	93,00	95,00	3,1	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	98,00	95,00	91,00	93,00	95,00	
SK 4	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif						SK 4	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif						
4,1	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	4,1	Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	118	90,00	91,00	92,50	95,00	
SK 5	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif						SK 5	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif						
5,1	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	5,1	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	98,00	95,00	95,25	95,50	96,00	
SK 6	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif						SK 6	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif						

Semula						Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target				Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023				2024	2021			2022	2023	2024
6,1	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	6,1	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	78.42	83,80	86,30	88,80	91,30		
SK 7	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal						SK 7	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal							
7,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77,00	85,20	85,50	85,80	86,00	7,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.26	87,50	88,00	88,50	89,00		
SK 8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK						SK 8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK							
8,1	Indeks pengelolaan data dan informasi yang baik	1.51	2.0	2.25	2.75	3.00	8,1	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	0	2,00	2.75	2.75	3,00		
SK 9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel						SK 9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel							
9,1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9,1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik															
							SK 1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang prima							

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022			2023	2024	
							1,1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	-	80,00	81,00	82,00	83,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							SK 2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos								
							2,1	Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	-	45,00	50,00	55,00	60,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							2,2	Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	-	82,00	84,00	86,00	88,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							SK 3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos								
							3,1	Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	-	73,00	76,00	79,00	82,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							3,2	Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	-	45,00	50,00	55,00	60,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022			2023	2024	
							SK 4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos								
							4,1	Persentase UMKM OT yang memenuhi standar (s/d 2021)	-	87,00	-	-	-		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							4,2	Persentase UMKM Kos yang memenuhi standar (s/d 2021)	-	70,00	-	-	-		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							4,3	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat (mulai tahun 2022)	-	-	60,00	65,00	70,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							4,4	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha (mulai tahun 2022)	-	-	60,00	65,00	70,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							4,5	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard (mulai th 2022)	-	-	95,00	96,00	97,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							4,6	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kosmetik yang sesuai standard (mulai th 2022)	-	-	95,00	96,00	97,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							SK 5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos								

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022			2023	2024	
							5,1	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	-	92,28	93,91	95,58	97,28		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							5,2	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	-	-	4,01	4,25	4,51		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							SK 6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos								
							6,1	Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	-	55	274	493	712		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							SK 7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal								
							7,1	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	-	82,90	85,00	87,10	89,20		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							SK 8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal								
							8,1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	-	84,00	85,00	86,00	87,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan			
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Target					Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024				2021	2022			2023	2024	
							SK 9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos								
							9,1	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	-	2,00	2,25	2,50	3,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	
							SK 10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel								
							10,1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	-	99,00	99,00	99,00	99,00		Penambahan Unit Kerja baru Dilingkup Deputi 2	

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik agar melakukan reviu Rencana Kerja Tahunan mengacu pada hasil reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini.

BAB III PENUTUP

Renstra Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra tersebut. Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan untuk menyelaraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik agar memperhatikan hasil Reviu Renstra. Selain itu, Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja Tahunan masing-masing dengan memperhatikan hasil Reviu Renstra. Melalui reviu Renstra ini, diharapkan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si